

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A, Imron Rizki. (2018). Self Assessment sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Analisis Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Apip. (2006). Sektor Keuangan. *Jurnal Manajemen*, 40.
- Armelia, V., Arkan, N. D., Ismoyowati, & Setianto, N. A. (2020). Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 Terhadap Usaha Peternakan Broiler di Indonesia. *Jurnal Prosding Seminar Teknologi Agribisnis Peternakan (STAP) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman*.
- Inggrid. (2006). Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas Dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 40.
- Kurniasari, P., Suharyono, S., & Kesuma, A. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Balikpapan dalam rangka Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13*, 21.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit. 1626.

Buku

- Arif Bachtiar, M. I. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosnidah, I. (2015). *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kustadi, A. (1996). *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sirait, P. (2014). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. (2003).
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- PP Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan COVID-19.
- PSAK Nomor 23 tentang Pendapatan.

PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
 PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
 Buletin Teknis Nomor 24 Tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.
 PMK Nomor 210 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
 Direktorat Jenderal Pajak.
 PMK Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
 PMK Nomor 107 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan
 Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka
 Penanganan COVID-19.
 PMK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak
 Pandemi COVID-19.
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara
 Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak
 Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan Dengan Pandemi COVID-19.

Website

Andry. (2020). *Pajakku*. Diambil kembali dari Pengaruh pengunduran pelaporan pajak terhadap APBN, serta Fungsi Pajak dalam mendukung APBN: <https://www.pajakku.com/read/5ea0faac20249840da3c22ba/Pengaruh-pengunduran-pelaporan-pajak-terhadap-APBN-serta-Fungsi-Pajak-dalam-mendukung-APBN>

Heri, A. (2019). *APBN dan APBD*. Diambil kembali dari Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat: <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/APBN%20dan%20APBD-BB/Topik-4.html>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2006). *SEJARAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA*. Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/sejarah-pengelolaan-keuangan/>

Pemerintah Kota Balikpapan. (2020, April 02). Diambil kembali dari Bukan Lockdown, Balikpapan Terapkan Pengetatan Sosial: <http://web.balikpapan.go.id/berita/read/8134>